TESIS

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PELAKSANAAN E-TILANG DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

OLEH:

Arif Fansuri
NIM. 1620112013

DOSEN PEMBIMBING :

1. Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,MH
2. Dr. Siska Elvandari, SH.,MH.

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PELAKSANAAN E-TILANG DI PENGADILAN NEGERI PADANG PANJANG

(Arif Fansuri, 1620112013, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 halaman, 2018)

ABSTRAK

Semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan menerapkan sistem bukti pelanggaran elektronik (*e*-tilang) yang diikuti dengan diterbikannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Namun terbitnya Perma Tilang dianggap telah mengabaikan asas praduga tak bersalah bagi pelanggar lalu lintas untuk mencari keadilan. Permasalahan dalam artikel ini adalah : 1) bagaimanakah implementasi asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum menggunakan sistem tilang elektronik? 2) bagaimanakah implementasi asas praduga tak bersalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang yang mengacu kepada Perma tilang lebih memberikan perlindungan dan menjamin asas praduga tak bersaalah bagi pelanggar lalu lintas. Pengaturan dan praktek penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. 2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir asas praduga tak bersalah sebagai suatu bentuk perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum dengan sistem e-tilang yang mengacu kepada Perma Tilang, tidak memberikan ruang bagi pelanggar lalu lintas sebagai *Justitiabelen* karena tidak dapat menghadiri sidang tilang. Untuk perbaikan penegakan hukum kedepannya perlu dilakukan peninjauan dan revisi terhadap Perma Tilang.

Kata Kunci: Lalu lintas, tilang, penegakan hukum, asas praduga tak bersalah.

THE IMPLEMENTATION OF PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE ON THE ENFORCEMENT OF E-TICKETING (TRAFFIC FINE) IN PADANG PANJANG COURT

(Arif Fansuri, 1620112013, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 113 halaman, 2018)

ABSTRACT

The rapid development of the means of transportation is inversely proportional to the obedience in traffic that led to the increasing number of violations of the traffic regulation. In order to prevent and combat traffic violations and to make the convenient, secure, peaceful, orderly and rapid traffic come to a realization, the government has issued regulations and legislation concerning traffic and road transport such as UU No. 22 Tahun 2009 on Traffic Road Transportation, by applying a system of electronic ticket (e-ticket) followed by the enactment of Supreme Court Regulation No. 12 Year 2016 (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016) on Procedures for the Settlement of Case Traffic. However the publication of Perma Tilang deemed to have waived the presumption of innocence for traffic violators to seek justice. The problems in this thesis are: 1) how are the presumption of innocence principle instigated in law enforcement against traffic offenses before using the electronic ticket system? 2) How are the presumption of innocence principle in law enforcement against traffic offenses by using an electronic ticket system? The approach used in this study is a sociological juridical method. The results showed that: 1. Law enforcement against traffic offenses before the enactment of the e-ticket with reference to the Perma ticketed more protection and guarantee the presumption of innocence principle for traffic violators. The regulations and the practice of the law enforcement gives easy access as well as providing protection to traffic violators. 2. Law enforcement against traffic violations using the e-ticket system that is guided by the Perma Tilang, lack or can not accommodate the presumption of innocence principle as a form of protection to the traffic violators. It is resulted from regulations of the e-evidence of traffic violation system, which refers to the Perma Tilang, did not leave room for traffic violators as justitiabelen being unable to attend the Tilang trial. For the improvement of law enforcement in the future a review and revision of the Perma Tilang needs to be carried out.

Key Words: Traffic, evidence of traffic violation, Law Enforcement, The principle of Presumption of Innocence.